

Implementasi Kebijakan Angela Merkel Terhadap Gelombang Pengungsi Timur Tengah

Steffy

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jayabaya

E-mail : Steffytomi.st17@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Angela Merkel's policy towards the Middle East refugee wave through the CEAS policy and the Open Door Policy that was implemented, in response to the refugee crisis in Europe in 2015. This is a problem because of the many different perceptions of refugees coming from the Middle East and because Germany is the leader of the European Union in enforcing its members to implement these policies. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach using secondary data. At the national or domestic level, this policy has drawn many protests and criticisms from the public, opposition parties, and Merkel's own party, interest groups and the European Union regarding this policy. Despite receiving many rejections, Merkel remains adamant and continues to implement the policy in Germany, this is because Merkel has a point of view or perception about refugees who must be assisted in seeking protection and security. This study uses the theory of Angela Merkel's Foreign Policy and the Theory of the Copenhagen School in examining the policies issued by Merkel regarding Middle Eastern refugees.

Keywords: Angela Merkel's foreign policy, Refugee Wave, Open Door Policy, Common European Asylum System, Germany, Middle East conflict, Copenhagen School.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Angela Merkel terhadap gelombang pengungsi Timur Tengah melalui kebijakan CEAS dan *Open Door Policy* yang diterapkan, guna merespon krisis pengungsi di Eropa tahun 2015 lalu. Ini menjadi masalah karena banyaknya persepsi yang berbeda terhadap pengungsi yang berasal dari Timur Tengah dan karena Jerman merupakan pemimpin Uni Eropa dalam memberlakukan anggotanya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis menggunakan data sekunder. Pada ranah nasional atau domestik kebijakan ini menuai banyak protes dan kritikan yang dilayangkan oleh masyarakat, partai oposisi, dan partai naungan Merkel sendiri, kelompok yang memiliki kepentingan serta Uni Eropa terkait kebijakan ini. meski mendapatkan banyak penolakan, Merkel tetap bersikukuh dan tetap menjalankan kebijakan tersebut di Jerman, hal ini karena Merkel memiliki sudut pandang atau persepsi tentang

pengungsi yang harus di bantu dalam mencari perlindungan dan keamanan. Penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri Angela Merkel dan Teori Mazhab Kopenhagen dalam meneliti kebijakan yang di keluarkan oleh Merkel terkait pengungsi Timur Tengah.

Kata Kunci : Kebijakan luar negeri Angela Merkel, Gelombang Pengungsi, Open Door Policy, Common European Asylum System, Jerman, konflik Timur Tengah, Mazhab Kopenhagen.

Pendahuluan

Lahirnya era globalisasi memaksa dan menuntut agar manusia dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakatnya. Namun hal tersebut mendapatkan penolakan dan pertentangan dari dunia ketiga, dimana hal tersebut malah membuat negara yang berada di bawah kemiskinan dan tidak sejahtera akan didiskriminasi sehingga berakhir dengan kehilangan identitas negaranya. Oleh sebab itu, hampir seluruh negara miskin dan berkembang memilih untuk berpihak kepada negara-negara yang memiliki *power* yang stabil.

Situasi dan masalah tersebut juga dialami oleh negara-negara yang berada di Timur-Tengah, setelah peristiwa *Arab Spring* di kawasan tersebut yang merupakan gerakan revolusi yang dilakukan oleh negara- negara Arab pada akhir tahun 2010 lalu. Arab Spring merupakan istilah untuk kebangkitan dunia Arab dan pemberontakan untuk mendapatkan kebebasan dari para penguasa atau pemimpin yang diktator di negara- negara Timur Tengah. Peristiwa itu terjadi karena banyaknya pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat, banyaknya pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatnya harga bahan pokok yang tidak dapat dicapai atau didapatkan oleh masyarakat miskin. Hal tersebut diyakini karena para penguasa dan Elit melakukan monopoli kekayaan dan korupsi besar-besaran, namun hal itu hanya sebagian faktor yang menyebabkan gerakan revolusi negara-negara Timur Tengah semakin menyebar luas. Pemberontakan sipil dalam kampanye yang akhirnya mengakibatkan serangan, demonstrasi, serta para masyarakat berusaha memanfaatkan media sosial dan media massa agar mendapatkan perhatian dunia internasional sehingga menjadikan Timur-Tengah sebagai kawasan yang rentan dan rawan terhadap konflik.

Berdasarkan peta konflik yang dilansir dari *The Economist*, ISIS hampir menguasai seluruh wilayah Timur maupun Utara, upaya yang dilakukan ISIS untuk, menguasai wilayah adalah dengan melakukan teror kepada masyarakat dan dengan menerapkan hukum Islam yang sangat ketat pada kaum muslim Shi'ah lainnya. Dalam aksinya ISIS dianggap sangat lihai dan teratur dalam strategi perang yang disiapkan, seperti rompi bunuh diri. Akibat dari aksi-aksi ISIS tersebut mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh dari masyarakat sipil maupun tentara pemerintah, sekitar 370.000 orang tewas akibat konflik di Suriah akibat aksi ISIS (2015). Setelah meledaknya konflik di Timur-Tengah, banyak masyarakat melakukan eksodus atau melakukan migrasi secara besar- besaran dari negara asal menuju negara yang lebih makmur seperti Uni Eropa, dan salah satunya yaitu Jerman. Warga Timur-Tengah memilih untuk melakukan eksodus dan meninggalkan negaranya bertujuan untuk mencari kehidupan yang lebih aman dan layak di Eropa.

Ketika para pengungsi menuju Eropa secara besar-besaran dan tak terkendali, anggota Uni

Eropa membentuk CEAS atau *Common European Asylum* untuk merespon datangnya pengungsi sehingga membantu para pengungsi agar mendapatkan hak-hak untuk terhindar dari tindakan kekerasan dari negara lain. Hal tersebut dilakukan karena prinsip dasar UE yang menjunjung tinggi menegakkan sistem demokrasi dan HAM. Namun, tidak dapat dipungkiri dan dihindarkan bahwa keputusan tersebut pasti akan menimbulkan pro dan kontra dari setiap anggota UE.

Jerman mengadaptasi CEAS ke dalam bentuk *Open Door Policy* dimana mereka membuka perbatasan seluas-luasnya untuk para pengungsi, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dicetuskan Angela Merkel sebagai Kanselir. Salah satu alasan yang mendorong para pengungsi dan pencari suaka berbondong-bondong datang ke Jerman adalah karena Jerman menampung pengungsi paling banyak dibanding negara Uni Eropa lainnya. Faktor lainnya adalah stabilitas dan kemajuan ekonomi yang dimiliki Jerman serta sejarah Panjang penerimaan mereka terhadap imigran atau pengungsi.

Pada tahun 2015 Jerman telah menerima 442.000 permohonan suaka. Jumlah ini merupakan yang tertinggi yang pernah diterima oleh negara Eropa selama 30 tahun terakhir. Aplikasi suaka ke Jerman sendiri menyumbang sekitar sepertiga dari pencari suaka Eropa di tahun 2015. Selama 30 tahun terakhir dari tahun 1985-2015, Jerman telah menerima setidaknya 3,6 juta aplikasi suaka atau hampir sepertiga (32%) dari semua aplikasi suaka di Eropa (Pew Research Center, 2016). Laporan Tren Global oleh UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees* 2015 jumlah orang yang melakukan migrasi berjumlah sekitar 65,3 juta jiwa, sedangkan pada tahun ini sekitar 9.287 jiwa manusia yang menuju negara Eropa. Jerman yang dianggap cukup besar dalam menerima pengungsi sejak tahun 2015-hingga akhir masa jabatan Angela Markel tahun ini. Jumlah migrasi yang terjadi hingga tahun ini dianggap sebagai migrasi yang jumlahnya lebih besar dari jumlah penduduk asli atau populasi negara-negara di Eropa. Kebanyakan para pengungsi yang menuju Jerman meningkat sekitar 40% dan rata-rata pengungsi berasal dari negara berkonflik yaitu Suriah dan Afghanistan. Akibat dari meningkatnya migrasi tersebut akhirnya membuat para pemerintah dan Menteri dalam negeri Jerman membatasi penerimaan pengungsi.

Dari penjelasan diatas dapat menunjukkan bahwa Angela Merkel memiliki peran yang dominan dalam mengeluarkan atau memberlakukan kebijakan-kebijakannya di Jerman maupun Eropa. Keputusan Merkel dalam mengabaikan berbagai aspek dari pihak Uni Eropa, Jerman maupun *national cost* yang besar dapat mengindikasikan adanya keterlibatan persepsi pribadi Angela Merkel terhadap isu pengungsi. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana implementasi kebijakan Angela Merkel terhadap gelombang Timur-Tengah?

Pembahasan

Agensi resmi ke pengungsian PBB menjadi sangat penting dalam memberikan bantuan dana bagi para pengungsi dan negara yang menerima pengungsi tersebut, sebagai contoh agensi UNRWA (*United Nations Relief and Works Agency*), dengan melonjaknya gelombang pengungsi pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan jumlah bantuan. Sehingga hal tersebut menarik perhatian dunia internasional, sebab diketahui

bahwa agensi tersebut memiliki program khusus yang menangani masalah pengungsi Timur- Tengah yang merupakan penyumbang pengungsi paling besar di dunia.

Namun walaupun menerima pengungsi paling banyak di Uni Eropa, Jerman tetap berusaha untuk memberikan dana bantuan bagi UNRWA. Walaupun tercatat di data donasi UNRWA bahwa Jerman juga menurunkan dananya dari tahun 2015 sekitar 91,8 juta dolar AS, 2016 menjadi 73,6 juta dolar AS dan pada tahun 2017 sekitar 76,3 juta dolar AS, penurunan bantuan dana tersebut disebabkan Jerman sedang mengalami kesulitan dalam menangani krisis pengungsi di negaranya. Namun pada pertengahan tahun 2018 UNRWA kembali mengumumkan bahwa Uni Eropa memberikan bantuan dana tambahan kepada agensi tersebut, sebesar 82 juta Euro atau setara dengan 98,4 juta dolar AS.

Jerman juga memperkirakan jumlah pengungsi akan lebih terkendali dan diperkirakan jumlah pengungsi juga akan berada di bawah 300.000 jiwa, dikarenakan pengungsi yang berdatangan merupakan sisa dari kasus tahun 2015 dan lokasi penampungan pengungsi sudah dipersiapkan oleh pemerintah Jerman. Dari data tersebut juga pemerintah Jerman mengatakan sekitar 70 persen para pengungsi yang tiba di Jerman sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai, namun para pengungsi yang baru berdatangan masih bergantung pada jaminan sosial sebelum akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pada tahun 2016 lalu, setelah kasus gelombang pengungsi yang sangat banyak berada di Jerman membuat para masyarakat Jerman menanggapi para pengungsi dengan negatif, hampir 49,5% jiwa mengatakan penolakan mereka kepada arus pengungsi di Jerman. Sehingga dengan terpaksa juga pemerintah Jerman mendeportasi 80.000 pengungsi pada tahun 2016, sehingga jumlah tersebut mungkin akan terus meningkat pada tahun 2017.

Walaupun alasan tersebut mendapatkan pro dan kontra dari negara Jerman sendiri, namun hal tersebut beralasan karena yang di deportasi merupakan para pencari suaka dan bukan pengungsi yang benar-benar membutuhkan perlindungan dari ancaman kekerasan dan konflik di negara asalnya. Selain itu upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan dan tempat bagi para pengungsi, jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman 2017 turun drastis dari pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 lalu, pemerintah Jerman merilis laporan terkait perhitungan terbaru tentang jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman dalam mendanai para pengungsi yang tidak memiliki dan belum memiliki pekerjaan di negara Jerman, adapun dana tersebut sebesar 93,6 miliar Euro atau sekitar 1.400 Triliun untuk mendanai pengungsi Suriah dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan pokok bagi pengungsi yang mencari perlindungan dan keamanan. Selain itu, ada juga dana untuk penyewaan rumah dan tunjangan lainnya, ataupun untuk mendanai urusan administrasi pengungsi Suriah sekitar 25,7 miliar Euro atau sebesar 386 Triliun.

Selain bantuan pemerintah Jerman kepada para pengungsi yang masih berada di perbatasan dan pengungsian, Jerman juga memberikan bantuan dana kepada negara-negara bagian Jerman yang turut membantu dan menerima para pengungsi di wilayah mereka. Negara-negara bagian bertanggung jawab atas pengungsi untuk dapat menampung mereka sementara selama proses permohonan pengungsi di Jerman di lakukan. Dengan jumlah pengungsi yang sudah mencapai 1 juta jiwa pada tahun 2016, negara- negara bagian mengalami kesulitan dan berakibat pada defisit anggaran sebab harus mendanai atau

mengeluarkan setidaknya

12.500 Euro per tahun. Yang digunakan untuk memenuhi tempat penampungan, logistik, keperluan makanan dan minuman, serta uang saku untuk para pengungsi. Jumlah pengeluaran negara-negara bagian diperkirakan 5 milyar Euro atau sekitar 75 Triliun Rupiah.

Upaya untuk menangani melonjaknya para pengungsi, 16 negara bagian dengan terbuka menerima para pengungsi masuk ke wilayah mereka. Sehingga pemerintah Jerman juga menerapkan kebijakan *integration, financial, and socio-political development (ISDF)*. Sehingga menyetujui menyalurkan dana sebesar 4 miliar Euro (Rp 65,4 triliun) kepada 16 daerah di negara tersebut pada tahun depan untuk membantu pemerintah setempat menangani pengungsi.

Kebijakan itu diputuskan setelah Kanselir Angela Merkel mengadakan pertemuan dengan kepala menteri untuk membahas langkah membantu pemerintah daerah yang berjuang menerima 800.000 pengungsi.

Namun tidak dapat dipungkiri jika pada tahun yang sama (2016) akhirnya Jerman memutuskan untuk mencabut perlakuan istimewa para pengungsi dengan alasan agar dapat membatasi jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman, negara-negara bagian Jerman menerapkan kebijakan *Asylum Package 2 (AP 2)*. Dalam hal ini, kementerian dalam negeri Berlin akan dengan tegas kembali menerapkan *assessment* individu bagi semua pengungsi atau dengan kata lain bahwa pengungsi harus menjalani beberapa proses melalui petugas yang berwenang untuk dapat memenuhi kriteria atau syarat sebagai pengungsi. Pemeriksaan tersebut akan dilihat dari asal usul pengungsi, apakah pengungsi berasal dari negara konflik atau tidak dan latar belakang pendidikan para pengungsi serta rute pengungsian yang akan di cek ulang dan diuji kebenaran data-data dan informasi tersebut. Tahun 2015 menjadi puncak dari gelombang pengungsi yang sangat besar, dilansir dari UNHCR jumlah pengungsi yang tiba di Jerman sekitar 52% jiwa dari negara Suriah, jumlah ini lebih banyak dari pada pengungsi yang berasal dari negara seperti Afghanistan 19%, Irak 6%, Eritrea 5%, Nigeria 2%, Pakistan 2%, Somalia 2%, Sudan 1%, Gambia 1%, dan Mali 1%. Sehingga dengan data yang dikeluarkan oleh UNHCR menunjukkan bahwa pengungsi dari negara Suriah merupakan penyumbang pengungsi yang paling banyak bagi Eropa terutama Jerman.

Adanya krisis di Suriah menjadi alasan untuk para pengungsi berbondong-bondong menuju negara yang di anggap akan menjanjikan bagi kehidupan masyarakat Suriah, selain itu alasan Jerman yang sangat terbuka dalam menerima para pengungsi juga menjadi alasan kuat bagi masyarakat Suriah melakukan migrasi massal ke negara tersebut. Jerman menjadi negara yang paling banyak menerima pengungsi dari Suriah pada tahun 2015 lalu, selain itu masyarakat asli Jerman menyambut hangat para pengungsi saat para pengungsi tiba di negara Jerman, bahkan jika para pengungsi yang datang merupakan orang yang memiliki ideologi maupun keyakinan yang berbeda dengan masyarakat Jerman. Pemerintah Jerman tetap menerima mereka dengan alasan bahwa para pengungsi datang ke negara Jerman untuk mencari kedamaian dan kehidupan yang layak.

Jerman akan terus mendorong kebijakan umum Uni Eropa agar lebih ambisius dan luas mengenai masalah krisis pengungsi, dengan upaya agar mewajibkan kuota yang permanen

untuk dapat berkontribusi dalam setiap pengungsi yang berasal dari Timur-Tengah yang jumlahnya mungkin akan mencapai ratusan ribu orang. Kewajiban jumlah kuota tersebut mendapatkan banyak tentangan dari negara anggota Uni Eropa, termasuk Inggris yang tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa. Angela Merkel sendiri sangat bertekad untuk dapat tetap menyuarkan hak para pengungsi yang berasal dari negara konflik.

Dengan adanya singgungan dari Merkel terkait anggota UE yang selalu menyuarkan solidaritas antar sesama anggota terhadap ancaman dari Rusia, namun mereka menolak akan pembagian beban kuota yang di timbulkan oleh krisis pengungsi. Sehingga pemimpin UE akhirnya sepakat agar negara anggota lainnya dapat berbagi tanggung jawab atas 160.000 jiwa pengungsi di negara mereka masing-masing, terutama bagi pengungsi yang sudah berada di kawasan Uni Eropa.

Akibat dari masalah krisis pengungsi ini memaksa pemerintah Jerman agar membangun sekitar 3.000 kelas sekolah tambahan bagi para pengungsi yang membawa anak-anak dan memerlukan pendidikan yang dibutuhkan. Di Berlin sendiri, setidaknya 1 juta jiwa pengungsi yang terdaftar melalui migrasi internasional tahun 2015.

Dengan jumlah tersebut, sehingga Merkel mendapatkan kecaman dan kritikan domestik yang meningkat akibat kebijakan penerimaan pengungsi yang di terapkannya tersebut. Uni Eropa yang selalu menjunjung tinggi kemanusiaan memiliki satu kebijakan yang di khususkan untuk para pengungsi atau di sebut dengan CEAS, kebijakan ini dibuat sejak tahun 1999 dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi yang sesuai dengan hukum internasional. Namun, walaupun menjadi pedoman kebijakan Uni Eropa untuk dapat mengadopsi kebijakan luar negeri yang selaras dalam mengatasi krisis pengungsi, tidak dapat memaksa negara anggota Uni Eropa untuk melakukan kebijakan ini. Dengan alasan negara anggota lainnya memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan hal tersebut tidak sejalan dengan pandangan Uni Eropa, sehingga penyebaran pengungsi juga tidak merata.

Jerman yang merupakan negara mayor Uni Eropa menganggap bahwa krisis pengungsi yang sedang di alami harus segera di atasi, sebab Jerman merupakan negara yang sangat terbuka dengan masuknya para pengungsi ke negaranya. Pengungsi terbanyak yang masuk ke Jerman berasal dari negara Suriah, hak tersebut di dimanfaatkan oleh Merkel untuk menerapkan kebijakan *Open Door Policy* khususnya para pengungsi dari Suriah. Alasan Merkel menerapkan ODP dikarenakan banyak negara anggota Uni Eropa menutup perbatasan atau jalur masuknya pengungsi ke negara mereka, kebijakan ODP merupakan implementasi dari CEAS.

Melihat kebijakan luar negeri Jerman dalam upayanya membentuk evolusi sikap yang pro-integrasi ditandai dengan menekankan sikap yang konsisten mendukung Perancis dalam mengupayakan kedaulatan bagi negara Eropa lainnya. Namun dengan konflik peran antara memperdalam integrasi Eropa dalam kebijakan luar negeri, keamanan bersama dan urusan dalam negeri serta keadilan melalui bidang politik. Serta adanya kecenderungan dasar Jerman dalam mengajak atau mendorong negara-negara Eropa untuk memihak pada Perancis, hal ini menjadi inti dari perilaku kebijakan luar negeri Jerman. Selain itu upaya Jerman yang mempertegas bahwa pemerintah Jerman harus dengan serius dan benar-benar mengakhiri penggunaan komersial energi nuklir dan harus disepakati bersama-sama, dan

ditegaskan oleh Menteri Luar negeri Jerman Joschka Fischer dalam kebijakan atau undang-undang NATO dan menyuarakan serta bertindak untuk membuat perjanjian koalisi untuk penggunaan senjata nuklir harus sesegera mungkin dihentikan.

Keputusan tersebut di suarakan karena berhubungan dengan hak asasi manusia, dimana Jerman pernah menjadi negara yang melakukan genosida pada perang dunia. Sehingga itulah menjadi alasan Jerman untuk memperbaiki citranya agar menjadi lebih baik dimata dunia dan menjadikan Jerman negara yang sangat peduli pada kemanusiaan, sebab bagi Jerman pentingnya peran norma dan nilai dalam membentuk perilaku kebijakan luar negeri Jerman. Dalam kasus perubahan kebijakan luar negeri Jerman terlihat juga saat pertempuran di bekas wilayah Yugoslavia meningkat pesat, Jerman sangat marah terhadap aksi militer yang terjadi di luar perbatasan membuat pemerintah koalisi Jerman terpecah menjadi dua suara karena masalah konstitusional misi di luar wilayah Jerman. Setelah mahkamah konstitusi berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut pada Maret 1994, pasukan Jerman akhirnya dikerahkan dengan persetujuan parlemen dalam menjaga perdamaian dan berusaha untuk menjadi negosiator dalam konflik Yugoslavia, walaupun sekali lagi tanpa mandat dari dewan keamanan PBB.

Selain itu Jerman juga sering kali dikenal sebagai negara pasifisme pasca perang dingin, Jerman ternyata menyimpan sejarah yang cukup panjang terkait pasifisme sejak sebelum perang dingin dimulai. Bibit-bibit pasifisme dalam berbagai bentuk sudah mulai tumbuh sejak zaman imperial Jerman. Terkait spektrum pasifisme, terdapat beberapa tipe atau macam dari pasifisme, yaitu Pasifisme Absolut, Pasifisme Pragmatis, Pasifisme Kepercayaan, dan Pasifisme terhadap Teknologi Nuklir. Pasifisme yang melekat pada Jerman merupakan Pasifisme Pragmatis (Pragmatic Pacifism) hal tersebut pada prinsipnya menentang peperangan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan adanya penggunaan paksaan sebagai bentuk pertahanan diri atau perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan demikian, pasifisme pragmatis mengamini bahwa perang dapat dijustifikasi dalam kasus-kasus tertentu, tetapi, karena berbagai hal praktis lainnya, menghindari peperangan akan lebih efektif dalam mencapai tujuan tersebut.

Pengeluaran Jerman terkait militer pun dipotong hingga setengahnya setelah Perang Dingin. Walaupun Jerman merupakan negara terbesar kedua dalam keanggotaannya di NATO, Jerman hanya menghabiskan 1,2% dari *Gross Domestic Product* (GDP) pada sektor militer/pertahanan. Angka tersebut jauh dari target 2% bagi masing-masing negara anggota. Jerman beberapa kali juga memperlihatkan sentimen Pasifisme tersebut. Kanselir Jerman pada tahun 2002 yaitu Gerhard Schroeder memberikan pernyataan yang tegas terhadap perang, terutama saat perang Irak (Rathbun, 2006).

Trauma masa lalu kemudian juga ikut membentuk atau mengembangkan pasifisme yang melekat pada pemerintah Jerman hingga masyarakatnya hingga tercipta slogan “never again” bagi Jerman. Dengan demikian, agen masyarakat dan struktur identitas tersebut masing- masing saling menciptakan satu sama lain. Identitas Jerman sebagai negara pasifisme membentuk kepentingan nasional yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya.

Oleh karena itu, Jerman dianggap telah mempertahankan konsep peran kebijakan luar negerinya dan digambarkan sebagai salah satu kontinuitas yang telah di modifikasi, melalui

berakhirnya perang dingin tidak merubah struktur kekuatan dunia seperti yang sebelumnya dikatakan oleh kaum realis. Sebab negara seperti Jerman memiliki konsepsi mereka sendiri tentang apa definisi anarki bagi mereka dan Jerman sudah bertindak sesuai dengan kebijakannya, konsepsi Jerman tentang dunia dan peran Jerman didalamnya sudah menunjukkan adanya kesinambungan yang cukup besar dengan melakukan perubahan selama sepuluh tahun terakhir.

Setelah meningkatnya isu konflik di wilayah Timur- Tengah, Jerman menerapkan Kebijakan *Open Door Policy* atau kebijakan pintu terbuka dengan cara menerima para pengungsi dengan mengupayakan agar pintu di perbatasan bagi seluruh pengungsi dapat masuk atau datang dari wilayah Timur- Tengah. Sehingga dengan adanya penerapan kebijakan tersebut jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman semakin meningkat pada tahun 2011, yang diakibatkan dari konflik Timur- Tengah seperti Suriah saat itu.

Merespon lebih lanjut untuk para pengungsi di Jerman yang setiap hari meningkat terus menerus, pemerintah Jerman memberlakukan beberapa program kebijakan berupa prosedur bagi para pengungsi atau pencari suaka baru seperti integrasi keuangan dan pembangunan sosial- politik, dipulangkan pengungsi jika diinginkan, adanya cabang perlindungan dan reunifikasi keluarga, serta deportasi penjahat asing. Kebijakan tersebut masih diberlakukan hingga saat ini di Jerman, agar para pengungsi dapat merasakan keamanan dan perlindungan dari pemerintah maupun masyarakat Jerman.

Selain isu kemanusiaan, adapun alasan Jerman dalam menerima pengungsi adalah karena Jerman memerlukan tenaga kerja asing. Hal ini dapat di perkuat melalui *The German Agein Survey* (DEAS) mengatakan bahwa jumlah populasi Jerman menurun dari 81,3 juta jiwa pada tahun 2013 menjadi 70,8 juta jiwa pada tahun 2060. Hasil prediksi tersebut dari usia 65 ke atas akan meningkat 32% menjadi 59% pada 2060, sehingga prediksi tersebut dapat mengganggu dan menurunnya produktivitas di Jerman. Dengan prediksi tersebut juga, dapat memberikan kesempatan pada para pengungsi dari Timur- Tengah untuk memperkuat sektor tenaga kerja yang nantinya akan mengarah pada masalah ekonomi di Jerman.

Dengan menerapkan kebijakan *Open Door Policy* di Jerman banyak negara anggota Uni Eropa mengkritik keras tindakan Jerman karena bersikeras untuk mempertahankan kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari negara anggota Uni Eropa lainnya mengapa kebijakan tersebut tetap diterapkan di Jerman. Karena Jerman menjadi negara yang paling banyak menerima pengungsi dibandingkan dengan negara Uni Eropa lainnya. Selain itu juga, Jerman menetapkan *Open Door Policy* sebagai kebijakan terhadap pengungsi khususnya dari pengungsi Suriah yang diharapkan memberikan kemudahan untuk para pengungsi masuk ke negara Jerman dengan jumlah yang sangat banyak.

Pada tanggal 24 Agustus 2015 Jerman mendeklarasikan bahwa negaranya sudah menggunakan protokol Dublin 1992 terhadap pengungsi Suriah, protokol tersebut merupakan kebijakan yang di terapkan oleh Uni Eropa untuk seluruh negara anggotanya dalam menerima pengungsi. Jadi Kebijakan Jerman untuk menerima pengungsi Suriah secara terbuka menjadi kebijakan yang dibuat berdasarkan alasan-alasan rasional untuk dapat mencapai kepentingan nasional.

Dengan kata lain, politik luar negeri Jerman terlihat mengalami perubahan yang signifikan setelah unifikasi Jerman, dapat diidentifikasi bahwa citra negara Jerman semakin menjadi lebih positif pada pemerintahan Kohl yang terlihat jelas melalui para pembuat kebijakan di semua partai besar Jerman. Selain itu jika dilihat pada masa pasca pemilu 2021 ini, kebijakan luar negeri sepertinya jika kabinet baru bukan dari kabinet sebelumnya terlihat sudah memiliki pakem yang tetap, yaitu fokus pada Uni Eropa dan *Transatlantic Partnership* (Jerman-Amerika Serikat) dan memiliki potensi untuk mempertahankan atau bahkan merubah isu terkait penanganan pengungsi dan *Nord Stream 2* (Jaringan pipa gas yang memungkinkan Jerman untuk secara efektif menggandakan impor gasnya dari Rusia). Seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, bahwa Jerman merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi liberal yang kuat dari pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, yang telah di ratifikasi melalui berbagai perjanjian regional dan internasional.

Implementasi CEAS dan ODP yang dianggap efisien dan seragam akan di bantu oleh EASO (*European Asylum Support Office*) agar dapat mencapai harmonisasi yang lebih kuat di antara sistem suaka di negara- negara anggota Uni Eropa. CEAS jugalah yang menangani sistem pembagian kuota pengungsi bagi negara Uni Eropa lainnya, sehingga melalui CEAS organisasi Uni Eropa memperkuat dan mengembangkan kerja sama dengan memastikan bahwa undang-undang Uni Eropa di lapangan dijalankan secara efisien dan terpercaya. Pada tahun 2016 Komisi Eropa mereformasi CEAS dengan alasan adanya masalah atau kelemahan pada sistem Dublin sebagai salah satu cara untuk memeriksa permohonan pengungsi serta perlakuan khusus untuk pengungsi.

Tujuannya agar meningkatkan ini elemen CEAS sebagai sebuah sistem kebijakan menjadi lebih baik seperti di perkuatnya basis data sidik jari para pengungsi melalui Eurodac. Jerman mengadaptasi CEAS ke dalam bentuk Open Door Policy dimana mereka membuka perbatasan seluas-luasnya untuk para pengungsi, kebijakan ini merupakan kebijakan yang dicetuskan Angela Merkel sebagai Kanselir. Salah satu alasan yang mendorong para pengungsi dan pencari suaka berbondong-bondong datang ke Jerman adalah karena Jerman menampung pengungsi paling banyak dibanding negara Uni Eropa lainnya. Faktor lainnya adalah stabilitas dan kemajuan ekonomi yang dimiliki Jerman serta sejarah Panjang penerimaan mereka terhadap imigran atau pengungsi. Pada tahun 2015 Jerman telah menerima 442.000 permohonan suaka. Pengungsi yang datang ke Jerman didominasi oleh mereka yang berasal dari Suriah daripada negara lainnya.

Open Door Policy merupakan turunan dari CEAS yang diterapkan di tingkat nasional oleh Jerman. Dengan kebijakan tersebut Jerman mencoba untuk mengimplementasikan CEAS dan memastikan bahwa standar umum penerimaan pengungsi sudah sesuai dengan ketentuan Uni Eropa mengenai perlindungan internasional. Dalam melaksanakan implementasi CEAS, melalui kebijakan ini Jerman berkontribusi terhadap pengurangan angka pengungsi di kawasan Eropa sebab mereka bertindak sebagai negara penerima paling besar dari negara anggota Uni Eropa lainnya. Dalam menangani masalah pengungsi ini proses melalui aplikasi suaka dan memberikan perlindungan kepada pengungsi tidak merata di seluruh negara-negara anggota Uni Eropa.

Common European Asylum System (CEAS) sebagai sebuah kebijakan di Uni Eropa

mempunyai kekurangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai CEAS ke negara-negara anggota Uni Eropa. Kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesulitan CEAS untuk menekan negara-negara anggota mengimplementasikan produk kebijakan pengungsi di Uni Eropa. CEAS sebagai sebuah kebijakan tidak memiliki sanksi yang keras terhadap negara-negara yang tidak mematuhi keputusan tersebut. CEAS sebagai sebuah kerangka harus lebih mengupayakan melaksanakan tanggapan bersama dan fokus pada pencari suaka, pengungsi, dan imigran di dalam Uni Eropa.
2. CEAS sebagai sebuah rezim internasional di kawasan Eropa belum bisa mengatasi permasalahan mengenai pencari suaka, pengungsi dan imigran meskipun sudah di reformasi. Uni Eropa sudah berupaya untuk mereformasi CEAS untuk menangani masalah ini, namun CEAS sebagai rezim internasional belum bisa meningkatkan kerja sama antara negara-negara Uni Eropa. Perbedaan kepentingan nasional negara-negara anggota Uni Eropa serta perbedaan respon terhadapnya munculnya kebijakan CEAS membuat penerapan CEAS belum bisa diterapkan sepenuhnya. Hal ini berujung pada tidak meratanya penyebaran pengungsi yang datang dari Timur Tengah ke Eropa. Kebijakan Open Door Policy yang diinisiasi oleh Angela Merkel telah memenuhi unsur kebijakan luar negeri. Kebijakan Open Door Policy didasarkan pada prinsip kemanusiaan dan keterbukaan yang mendorong Angela Merkel untuk menerima pengungsi dari korban konflik yang berasal dari Suriah.

Dalam kasus ini di tahun 2015 lalu, Uni Eropa dihadapkan dengan masalah krisis pengungsi, hal ini dimulai dengan jumlah gelombang pengungsi yang masuk ke wilayah Eropa dengan sangat masif akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur-Tengah. Hal tersebut berdampak sangat besar bagi Eropa dan wilayah sekitar Timur-Tengah, sehingga mencuri perhatian masyarakat internasional dan ditambah saat peristiwa yang melanda para pengungsi yang menuju Eropa saat terjadinya peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut ribuan pengungsi untuk dapat mencapai daratan Eropa ditahun yang sama yaitu 2015. Kasus atau peristiwa tersebut terjadi di laut Mediterania yang memakan sekitar 1.200 korban jiwa, sehingga dengan terjadinya peristiwa tersebut mengakibatkan akan terus meningkat jumlah pengungsi yang akan menuju Eropa demi mencari perlindungan. Dengan terjadinya krisis pengungsi tersebut ditahun 2015, menjadikan Jerman sebagai negara yang paling banyak menerima pengungsi dari Timur-Tengah. Karena adanya kebijakan yang diberlakukan oleh Jerman, sehingga Jerman di sebut sebagai *Willkommenskultur* atau *a culture of being welcoming* (negara yang mau menerima pengungsi), hal tersebut dibandingkan dengan negara Eropa lainnya yang berusaha menolak bahkan menutup pintu perbatasan mereka.

Jerman yang memiliki sejarah panjang akan penerimaan pengungsi, Jerman juga terkenal sangat terbuka terhadap datangnya pengungsi dan masyarakat Jerman dengan ramah menyambut para pengungsi, walaupun tidak sedikit juga mendapat penolakan dan kecaman dari kelompok-kelompok ekstrem kanan atau Neo-Nazi, karena alasan akan mengancam keamanan negara Jerman. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan keinginan masyarakat Jerman untuk tetap menerima pengungsi, bahkan laporan dari penelitian yang di keluarkan

oleh perusahaan penyiaran *Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland* (ARD), 88% masyarakat Jerman bersedia menyumbangkan kebutuhan sekunder (seperti pakaian, selimut dll.) dan memberikan uang tunai untuk membantu para pengungsi selama di lokasi penampungan, ada pula masyarakat Jerman yang dengan sukarela membantu turun tangan dalam setiap kegiatan di kamp pengungsi.

Sejak tahun 2015 hingga 2017, krisis pengungsi yang menuju Jerman mencapai 1.407.838 jiwa, jumlah tersebut juga merupakan yang paling banyak di bandingkan negara UE lainnya. Para pengungsi yang paling banyak menuju Jerman didominasi oleh pengungsi yang berasal dari kawasan Timur-Tengah terutama negara Suriah.

Dari jumlah pengungsi diatas, pemerintah Jerman mengaku tidak menerima seluruh pengungsi yang mengajukan diri untuk migrasi ke Jerman, pemerintah Jerman berusaha untuk tetap memprioritaskan pengungsi yang sudah memiliki keluarga di Jerman atau pengungsi yang sudah memiliki surat-surat lengkap, sesuai dengan standarisasi, dapat berbahasa Jerman, dalam keadaan yang tidak berbahaya atau tidak mengancam keamanan negara Jerman. Sebab, banyaknya pengungsi yang masuk ke Jerman, tentunya menyenangkan masalah tersendiri bagi tanah air mereka. Sehingga untuk mengatasi atau menghindari krisis pengungsi yang datang, maka pemerintah Jerman membagi kuota pengungsi ke negara- negara bagian dan menyalurkan dana bantuan untuk negara-negara bagian dan kota-kota dalam mengatasi pengungsi. Pemerintah Jerman menyediakan sekitar 9,3 miliar Euro yang disebar ke-16 negara bagian Jerman, untuk membantu para pengungsi agar tahun 2015 hingga 2016 tidak mengalami kesulitan dan kelaparan.

Pembagian kuota pengungsi untuk negara-negara bagian Jerman didistribusikan secara proporsional oleh pemerintah Federal, secara singkat, pembagian kuota para pengungsi dirumuskan berdasarkan pada pendapatan pajak dan jumlah penduduk dari negara bagian. Sehingga dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan jumlah pendapatan pajak tersebut, maka akan menerima jumlah pengungsi lebih banyak dari wilayah lainnya. Begitu pun sebaliknya, dengan begitu dapat mengurangi beban keuangan bagi negara bagian karena adanya pengungsi. Persentase penerimaan pengungsi yang berbeda-beda dikarenakan sesuai dengan kemampuan negara bagian, sehingga penyebaran pengungsi tidak memberatkan negara yang tidak memiliki pendapatan pajak yang sedikit.

Secara singkat dapat di lihat bahwa, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Jerman mengimplementasikan CEAS melalui *Asylgetz*. *Asylgetz* di pandang lebih relevan terhadap pengungsi karena tidak hanya berfokus pada prosedur tetapi juga pada pemenuhan hak-hak pengungsi. Selain itu, berlajunya *Asylgetz* juga dapat membatasi pengungsi yang berasal dari negara-negara yang dikategorikan aman, sehingga dapat menciptakan suaka yang adil dan aman untuk para pengungsi di Uni Eropa.

Walaupun demikian, implementasi CEAS di Jerman tidak selalu berjalan lancar, sebab tingginya jumlah pengungsi yang berasal dari Timur-Tengah di Jerman membuat pemerintah Jerman mengalami kesulitan dalam menampung pengungsi, oleh sebab itu, sejumlah fasilitas umum yang ada akhirnya diubah menjadi pusat penerimaan awal pengungsi. Selain itu, tingginya jumlah pengungsi di Jerman juga menyebabkan Polisi Federal melakukan kontrol terhadap perbatasan, lokasi jalur masuknya para pengungsi.

Kontrol yang dilakukan pemerintah Jerman di perbatasan Austria mengakibatkan Jerman menanggukkan perjanjian Schengen atau perjanjian yang memberikan kebebasan lalu lintas antar negara tanpa melewati pemeriksaan yang ketat di Uni Eropa.

Secara terminologi, kebijakan *Open Door* merujuk pada sikap Jerman yang terbuka atau menerima para pengungsi untuk menuju wilayah Jerman. Kata *Open Door* digunakan dalam teknik manajemen kepemimpinan dalam kasus ini adalah upaya Merkel dalam menunjukkan dominasi kepemimpinannya di Jerman, untuk menerima pengungsi Timur-Tengah yakni pada tanggal 31 Agustus 2015. Melalui pernyataan Merkel yang berbunyi “Kita telah berhasil melakukan banyak hal – kita bisa melakukan ini” pernyataan tersebut dikatakan dengan mencerminkan rasa ragu oleh Merkel. Sebab akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah Jerman maupun masyarakat Jerman. Tetapi kalimat pernyataan tersebut telah mewakili sikap Jerman terhadap isu pengungsi di Eropa, sehingga lewat pernyataan tersebut pula, kebijakan *Open Door* mulai di berlakukan di Jerman.

Angela Merkel dalam pemerintahan Jerman memiliki posisi yang sangat penting, posisinya sebagai Kanselir Jerman tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman termasuk didalamnya adalah kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, dikeluarkannya kebijakan *Open Door* pada tahun 2015 guna mengatasi masalah krisis pengungsi di Eropa yang tidak dapat di hindarkan dari pengaruh maupun agenda-agenda yang dijalankan oleh Angela Merkel. Sehingga Merkel dianggap telah menjadi “wajah” dari kebijakan terkait pengungsi yang dikeluarkan untuk mengatasi krisis pengungsi pada tahun 2015 lalu (Matthias Mayer). Secara lebih lanjut, sebelum tahun 2015, gaya berpolitik yang dijalankan atau dimiliki oleh Merkel dianggap cenderung pragmatis dan menggunakan langkah-langkah yang inkremental.

Hal tersebut kemudian berubah setelah Merkel menghadapi krisis pengungsi di Eropa, tidak dapat dihindari bahwa dengan status yang dimiliki oleh Merkel sebagai seorang wanita yang sekaligus menjadi Kanselir Jerman, Merkel dapat memanfaatkan posisinya yang dimiliki untuk menentukan agenda-agenda dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkan baik dalam situasi krisis maupun tidak.

Dalam menunjukkan dukungan kepada para pengungsi, dapat dilihat bahwa Merkel memiliki upaya yang cukup kuat agar dapat memberikan bantuan dan perlindungan yang maksimal terhadap pengungsi yang membutuhkan, atau dalam hal ini adalah pengungsi perempuan dan anak-anak. Perlindungan terhadap pengungsi kemudian ditunjukkan dengan adanya upaya untuk dapat mempercepat proses pemberian status dan perlindungan terhadap pengungsi.

Tidak hanya agenda untuk memberikan keamanan fisik terhadap pengungsi yang diusahakan oleh Merkel, namun juga untuk mewujudkan agenda lain yang berusaha untuk dilakukan yakni integrasi pengungsi terhadap kondisi sosial dan masyarakat Jerman. Integrasi kemudian menjadi upaya yang dilakukan oleh Merkel dan pemerintah Jerman untuk mengelola keberadaan pengungsi yang berada di Jerman.

Pada dasarnya dalam memandang masalah krisis pengungsi akibat *Open Door* di Jerman ada yang pro dan kontra terhadap penerimaan pengungsi, dari pihak pemerintah Jerman sendiri bahwa penerimaan pengungsi dalam segi ekonomi akan menjadi keberuntungan

karena Jerman membutuhkan penduduk baru agar ekonominya tetap produktif. Awal tahun 2015 Jerman membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan untuk kalangan profesional muda yang ingin bekerja. Negara Jerman memberikan lowongan dan menerima pengungsi di akibatnya banyaknya penduduk asli Jerman berada di usia pensiun dan tak layak bekerja. Hal tersebut di sebabkan karena rendahnya angka kelahiran di Jerman, sehingga otomatis semakin sedikit pula penduduk dengan usia kerja.

Upaya yang dilakukan oleh Jerman dengan menerapkan *Open Door Policy* membuat sebagian anggota Uni Eropa mengkritik tindakan Jerman dengan mempertahankan kebijakannya tersebut. Jerman menetapkan *Open Door Policy* sebagai kebijakan terhadap pengungsi khususnya asal Suriah yang nantinya akan mempermudah masuknya pengungsi yang datang ke negaranya dengan jumlah yang sangat banyak.

Open Door Policy merupakan kebijakan yang di terapkan oleh Jerman bagi pengungsi dan Merkel mengatakan bahwa Kebijakan *Open Door Policy* itu sebagai kebijakan bagi para pengungsi yang datang ke Jerman untuk mencari perlindungan. Selain itu, akhir 2015 lalu Jerman mendeklarasikan bahwa negaranya sudah menggunakan protokol Dublin 1992 terhadap pengungsi Suriah, protokol tersebut merupakan suatu kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa untuk seluruh negara anggotanya.

Kebijakan Open Door awalnya dibuka untuk menawarkan kepada pengungsi yang menuju Eropa, namun akhirnya kebijakan ini dirancang untuk mengurangi jumlah pengungsi yang datang menuju Eropa. Selain alasan yang tampaknya kontradiktif dibalik dua keputusan kebijakan luar negeri ini, peran yang dimainkan oleh media domestik dalam keputusan Merkel untuk membuka perbatasan dan menerapkan kebijakan tersebut sangat luar biasa. Hubungan antara laporan media dan opini publik telah lama terjalin, sedangkan hubungan antara kebijakan luar negeri dengan media masih sangat baru.

Sehingga pergeseran opini publik Jerman tentang kebijakan luar negeri Merkel sebagai penggerak politik domestik (media massa) yang penting dan ketegangan akibat meningkatnya jumlah pengungsi terhadap layanan publik. Dalam hal ini, Angela Merkel juga memutuskan untuk bertindak berdasarkan tanggung jawab moral untuk membantu para pengungsi yang melarikan diri dari kekerasan dan perang. Meskipun keputusan tersebut didasarkan pada etos dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi, namun tindakannya tidak diwajibkan secara hukum. Ini menyoroti peran Merkel dalam keputusannya untuk menerima pengungsi yang datang ke Jerman.

Implementasi CEAS yang dianggap efisien dan seragam akan di bantu oleh EASO agar dapat mencapai harmonisasi yang lebih kuat di antara sistem suaka di negara-negara anggota Uni Eropa.

Dalam menunjukkan dukungan kepada para pengungsi, dapat dilihat bahwa Merkel memiliki upaya yang cukup kuat agar dapat memberikan bantuan dan perlindungan yang maksimal terhadap pengungsi yang membutuhkan, atau dalam hal ini adalah pengungsi perempuan dan anak-anak. Perlindungan terhadap pengungsi kemudian ditunjukkan dengan adanya upaya untuk dapat mempercepat proses pemberian status dan perlindungan terhadap pengungsi. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai Kanselir Jerman, akan mempermudah Merkel dalam menyebarkan pengaruh agenda-agendanya yang esensial terutama bagi Uni Eropa. Kebijakan *Open Door* awalnya dibuka untuk menawarkan

kepada pengungsi yang menuju Eropa, namun akhirnya kebijakan ini dirancang untuk mengurangi jumlah pengungsi yang datang menuju Eropa

Kesimpulan

Agensi resmi ke pengungsian PBB menjadi sangat penting dalam memberikan bantuan dana bagi para pengungsi dan negara yang menerima pengungsi tersebut, sebagai contoh agensi UNRWA, dengan melonjaknya gelombang pengungsi pada tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan jumlah bantuan. Sehingga hal tersebut menarik perhatian dunia internasional, sebab diketahui bahwa agensi tersebut memiliki program khusus yang menangani masalah pengungsi Timur-Tengah yang merupakan penyumbang pengungsi paling besar di dunia.

Namun walaupun menerima pengungsi paling banyak di Uni Eropa, Jerman tetap berusaha untuk memberikan dana bantuan bagi UNRWA. Walaupun tercatat di data donasi UNRWA bahwa Jerman juga menurunkan dananya dari tahun 2015 sekitar 91,8 juta dolar AS, 2016 menjadi 73,6 juta dolar AS dan pada tahun 2017 sekitar 76,3 juta dolar AS, penurunan bantuan dana tersebut disebabkan Jerman sedang mengalami kesulitan dalam menangani krisis pengungsi di negaranya. Namun pada pertengahan tahun 2018 UNRWA kembali mengumumkan bahwa Uni Eropa memberikan bantuan dana tambahan kepada agensi tersebut, sebesar 82 juta Euro atau setara dengan 98,4 juta dolar AS.

Jerman juga memperkirakan jumlah pengungsi akan lebih terkendali dan diperkirakan jumlah pengungsi juga akan berada di bawah 300.000 jiwa, dikarenakan pengungsi yang berdatangan merupakan sisa dari kasus tahun 2015 dan lokasi penampungan pengungsi sudah dipersiapkan oleh pemerintah Jerman. Dari data tersebut juga pemerintah Jerman mengatakan sekitar 70 persen para pengungsi yang tiba di Jerman sudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai, namun para pengungsi yang baru berdatangan masih bergantung pada jaminan sosial sebelum akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pada tahun 2016 lalu, pemerintah Jerman merilis laporan terkait perhitungan terbaru tentang jumlah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Jerman dalam mendanai para pengungsi yang tidak memiliki dan belum memiliki pekerjaan di negara Jerman, adapun dana tersebut sebesar 93,6 miliar Euro atau sekitar 1.400 Triliun untuk mendanai pengungsi Suriah dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan pokok bagi pengungsi yang mencari perlindungan dan keamanan.

Trauma masa lalu kemudian juga ikut membentuk atau mengembangkan pasifisme yang melekat pada pemerintah Jerman hingga masyarakatnya hingga tercipta slogan '*never again*' bagi Jerman. Identitas Jerman sebagai negara pasifisme membentuk kepentingan nasional yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya. Terkait kebijakan luar negeri, Jerman memiliki komitmen menjaga perdamaian dan keamanan dunia, salah satunya adalah *championing disarmament and arms controls*, atau memperjuangkan perlucutan senjata/ pembatasan angkatan bersenjata dan kontrol senjata.

Setelah meningkatnya isu konflik di wilayah Timur-Tengah, Jerman menerapkan Kebijakan *Open Door Policy* atau kebijakan pintu terbuka dengan cara menerima para pengungsi dengan mengupayakan agar pintu di perbatasan bagi seluruh pengungsi dapat masuk atau datang dari wilayah Timur-Tengah. Sehingga dengan adanya penerapan

kebijakan tersebut jumlah pengungsi yang masuk ke Jerman semakin meningkat pada tahun 2011, yang diakibatkan dari konflik Timur- Tengah seperti Suriah saat itu.

Para pengungsi yang paling banyak menuju Jerman didominasi oleh pengungsi yang berasal dari kawasan Timur-Tengah terutama negara Suriah. Dari jumlah pengungsi diatas, pemerintah Jerman mengaku tidak menerima seluruh pengungsi yang mengajukan diri untuk migrasi ke Jerman, pemerintah Jerman berusaha untuk tetap memprioritaskan pengungsi yang sudah memiliki keluarga di Jerman atau pengungsi yang sudah memiliki surat-surat lengkap, sesuai dengan standarisasi, dapat berbahasa Jerman, dalam keadaan yang tidak berbahaya atau tidak mengancam keamanan negara Jerman. Pemerintah Jerman menyediakan sekitar 9,3 miliar Euro yang disebar ke-16 negara bagian Jerman, untuk membantu para pengungsi agar tahun 2015 hingga 2016 tidak mengalami kesulitan dan kelaparan.

Secara singkat dapat di lihat bahwa, sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Jerman mengimplementasikan CEAS melalui *Asylgetz*. *Asylgetz* di pandang lebih relevan terhadap pengungsi karena tidak hanya berfokus pada prosedur tetapi juga pada pemenuhan hak-hak pengungsi.

Daftar Referensi

- Carolina R, Fina. Upaya Pemerintah Jerman Dalam Menangani Pengungsi, Vol 4 Hal 9. 2016. (Diakses 20 September 2021)
- Fitri, Marniza. Kebijakan Luar Negeri Jerman Terhadap Pengungsi Suriah Tahun 2015. Hal. 25. (Diakses 18 September 2021)
- Khalifah, Nur. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jerman Menjadi Ramah Pengungsi Asal Suriah di Kawasan Uni Eropa Pada Tahun 2014-2015. Hal.50. 2018. (Diakses 19 September 2021)
- Kusuma Wardhani, Ratna. Peran Trauma dan Memori Dalam Politik Luar Negeri: Studi Kasus Kebijakan Jerman Menerima Pengungsi Suriah 2011- 2015. Vol.3 No.2 2017. (Diakses 20 September 2021)
- Malva Islami, Nadia. Keengganan negara-negara North atas Pembagian Beban Dalam Tata Kelola Pengungsi Global: Kasus Pengungsi Timur-Tengah.2018. . (Diakses 18 September 2021)
- Nabilatul Khaira, Annisa. Pengaruh Persepsi Angela Merkel dalam penetapan Open Door Policy Jerman masa krisis pengungsi Eropa 2015, Hal. 5, 2020. (Diakses 19 September 2021)
- Tri Haliza, Faradhilah. & Bambang Pujiyono, Kebijakan Open Door Policy Oleh Angela Markel Dalam Kerangka Common European Asylum System (CEAS), Hal. 6. 2016. (Diakses 20 September 2021)